BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat sejak dulu. Setiap orang memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Tujuan pendidikan sering dirumuskan untuk menyiapkan generasi muda menjadi orang dewasa anggota masyarakat yang mandiri dan produktif. Fungsi sekolah erat hubungannya dengan masyarakat.

Pendidikan dalam masyarakat memiliki tiga sifat penting, pertama, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pribadi anak agar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat.[1]

Di Indonesia sendiri, secara praktis lahirlah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Undang-Undang dalam sistem pendidikan dan pengajaran tersebut sebagai upaya dalam pengembangan pendidikan nasional demi tercapainya tujuan pendidikan secara umum di Indonesia, dimana tujuannya adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air

[1]Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 58.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Lebih fokus dalam Undang-Undang tersebut, diatur tentang kurikulum pendidikan yang tercantum dalam pada pasal 36, 37, dan 38. Adapun pada pasal 36 ayat 3, menyebutkan bahwa

> Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa, (b) peningkatan akhlak mulia, (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan, (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (f) tuntutan dunia kerja, (g) tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (h) agama, (i) dinamika perkembangan global, dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.[2]

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman maka kebutuhan masyarakat juga semakin kompleks. Sehingga pendidikan yang telah ada dirasakan kurang dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Dengan adanya tuntutan ini pendidikan memerlukan banyak penyesuaian termasuk kurikulumnya. Hal ini dikarenakan kurikulum merupakan salah satu penentu dari keberhasilan pendidikan, dan kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan mempersiapkan generasi muda untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya terbatas pada kegiatan formal belajar mengajar dikelas yang dilakukan oleh seorang guru, tetapi memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat bagi para siswa.

[2]*Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Beserta Penjelasannya* (Surabaya: Media Centre, 2005), 26.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, kurikulum kita telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan. Tercatat sejak tahun 1945 hingga sekarang kurikulum di Indonesia telah mengalami penyempurnaan sebanyak sembilan kali. Di awali pada tahun 1947 yang diberi nama Rentjana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Karena suasana kehidupan di Indonesia waktu itu masih penuh dengan semangat juang merebut kemerdekaan, maka kurikulum yang ada lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain.[3]

Menurut keterangan dalam buku Pengembangan Kurikulum, yang ditulis oleh Ahmad, dkk, disebutkan bahwa pada tahun 1952 adalah pertama kalinya diterbitkan Rencana Pembelajaran oleh kementrian P D & K yang dipergunakan untuk Sekolah Rakyat tiga tahun dan enam tahun.[4] Kurikulum ini disebut dengan Rentjana Pelajaran Terurai 1952. cari dari kurikulum ini adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya adalah Rentjana Pendidikan 1964 atau biasanya dikenal dengan nama kurikulum Pancawardhana. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keterampilan, dan jasmani. Namun pada tahun 1968 kurikulum di negara ini mengalami penyempurnaan lagi, yaitu perubahan struktur kurikulum

[3]*Bagaimanakah Perjalanan Kurikulum Nasional Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah*, (http://rbayans.wordpress.com., diakses 16 januari 2015)

[4] M.Ahmad, dkk, pengembangan kurikulum (Bandung: pustaka setia, 1998), 164.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Tujuan pendidikan pada kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum SD tahun 1968 yang diberlakukan sejak 1 Januari 1968 merupakan realisasi dari TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966, Bab II pasal 2 ayat (3) berbunyi " Pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah dasar sampai dengan universitas negeri".[5]

Pada tahun 1975 terjadi perubahan lagi karena kurikulum sebelumnya dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada. Perubahan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut:

1. Kegiatan-kegiatan pembaharuan pendidikan selama pelita I yang dimulai pada tahun 1969 telah melahirkan gagasan baru yang sudah memasuki pelaksanaan sistem pendidikan.
2. Kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN menuntut implementasinya.
3. Hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional telah mendorong departemen P dan K untuk meninjau pelaksanaan pendidikan nasional.
4. Inovasi (pembaharuan) di dalam sistem belajar dan mengajar yang dirasakan dan dinilai lebih efisien dan efektif, telah memasuki dunia pendidikan Indonesia.

[5]M.Ahmad, dkk, pengembangan kurikulum (Bandung: pustaka setia, 1998), 170.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5. Keluhan-keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan mendorong petugas-petugas pendidikan untuk meninjau sistem yang sedang berlaku.

Setelah pemberlakuan kurikulum 1975 selama kurang lebih delapan tahun, maka dinilai perlu untuk melakukan pergantian lagi karena atas dasar perkembangan yang ada, menjelang tahun 1983 antara tuntutan masyarakat dan ilmu pengetahuan/teknologi terhadap pendidikan dalam kurikulum 1975 dianggap tidak sesuai lagi. Kurikulum 1984 tampil sebagai revisi terhadap kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dan kurang memperhatikan isi pelajaran. Kemudian pada tahun 1994 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan lagi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perbedaan dengan kurikulum sebelumnya adalah sistem pembagian waktu pelajaran. Jika dulu menggunakan sistem semester maka sekarang diubah menjadi sistem caturwulan dengan perubahan ini diharapkan siswa akan menerima materi pelajaran cukup banyak.

Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi pada tahun 2004. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sebagi konsekuensi logis dilaksanakannya Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. KBK ini

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah telah menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan. Terdapat perbedaan mendasar dibandingakn dengan KBK sebelumnya, bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapan.

Mengenai sejarah kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia, sebenarnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Kholid Fathoni dalam buku Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru) sebagai berikut:

> Saat itu Ki Hajar Dewantara selaku menteri P.P.& K pada kabinet pertama RI, telah memberikan surat edaran ke daerah-daerah yang menyatakan bahwa pelajaran budi pekerti yang telah ada pada zaman Jepang dapat diganti dengan pelajaran agama. Namun karena tidak memiliki dasar yang kuat maka pelaksanaannya hanya bersifat suka rela saja. Hingga pada tahun 1946 atas perjuangan umat Islam yang duduk dalam BKNIP maka pendidikan agama dapat diberikan di sekolah-sekolah negeri dengan syarat, bila diminta minimal oleh sepuluh siswa. Untuk merealisasir hal tersebut maka dikeluarkan penetapan bersama antara Menteri Agama dengan Nomor 1285/K 7 tanggal 12 Desember 1946 dan Menteri P.P. & K. dengan Nomor 1142/BHG.A Tanggal 12 Desember 1946. Namun karena masih terdapat banyak kekurangan maka dikeluarkan peraturan bersama pada

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> tanggal 16 Juli 1951 dengan Nomor 176781 Kab. oleh Menteri P.P. & K dan Nomor K/1/9180 oleh Menteri Agama. Sejak itu pendidikan agama telah resmi masuk di sekolah-sekolah negeri maupun swasta mulai tingkat S.R sampai SMA serta sekolah-sekolah kejuruan.[6]
> Pada tahun 1960, pendidikan agama di sekolah-sekolah mulai mendapatkan status yang lebih kuat, yaitu dengan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 bab II pasal 2 ayat (3) yang berbunyi "menetapkan pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah dari Sekolah Rakyat sampai dengan Universitas-Universitas Negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatan"[7].
> Setelah meletusnya G 30 S. PKI pada tahun 1965, diadakan sidang umum MPRS pada tahun 1966 hingga dihasilkan sebuah ketetapan MPRS dengan Nomor XXVII/MPRS/1966 bab I pasal 1 yang berbunyi "Menetapkan pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-Universitas Negeri". Serta selanjutnya menurut Tap MPR No. IV/MPR/1973 jo Tap MPR No. II/MPR/1983 tantang GBHN yang menyatakan bahwa pendidikan agama semakin kuat kedudukannya karena telah dimasukkan dalam GBHN.[8]

Kebutuhan umat Islam di Indonesia pada era reformasi ini amat mendesak, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas untuk menghadapai perubahan menuju masyarakat madani. Maka kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan untuk memperbaiki mutu SDM muslim di Indonesia. Karena jika tidak dilakukan perubahan, pendidikan Islam akan tetap terbelakang dan tidak mampu bersaing dalam kehidupan masyarakat madani Indonesia.

Disamping *life skill* yang merupakan hal utama dalam kurikulum di Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Agama Islam juga merupakan hal yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan kurikulum bagi siswa yang menganut agama Islam. Karena Pendidikan Agama Islam akan

[6]Muhammad Kholid Fathoni, Z. Yusuf ed., *Pendidikan Islam Dan Pendidikan Nasional Paradigma Baru* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 37.
[7] Fathoni, pendidikan islam, 38.
[8] Fathoni, pendidikan islam, 39.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menjadi dasar dari setiap keterampilan yang diperoleh siswa. Hingga pada akhirnya nanti siswa tidak hanya mendapat bekal keterampilan tetapi juga nilai-nilai agama. Dengan demikian apabila siswa telah terjun ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat, mereka dapat menjadi seorang wirausaha yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana telah disebutkan, isi dari pasal 36 ayat 3 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yang menyatakan bahwa kurikulum yang disusun harus memperhatikan sepuluh aspek, diantaranya adalah peningkatan iman dan takwa. Disamping pasal 36 tersebut, dalam pasal 37 juga dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama.

Namun pendidikan agama yang diberikan di sekolah ini tidak hanya sebatas pembekalan pengetahuan agama pada siswa. Kurikulumnya harus relevan dengan kondisi masyarakat yang ada. Masyarakat Indonesia sejak dulu mempunyai keinginan agar agama dibelajarkan di sekolah-sekolah. Hal ini dikarenakan masyarakat juga memiliki harapan agar pendidikan agama tidak hanya mengajari ibadah tetapi juga membangun moral siswa.

Dari latar belakang di atas, juga dari beberapa literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah-masalah kurikulum di Indonesia, yang kesemuanya mengupayakan bagaimana kurikulum berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu membentuk manusia yang mempunyai kepribadian yang luhur, baik dalam berpikir, bersikap maupun dalam bertindak serta berinteraksi dengan masyarakat. Untuk itu peneliti mempunyai ketertarikan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang kuat untuk meneliti tentang kurikulum tersebut dan mengangkat judul Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat di Sekolah Menengah Pertama Islam Sunan Kali Jaga Karangpring Sukorambi Jember.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah untuk membatasi penjabaran sebagai berikut:

1. Bagaimana model pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat di Sekolah Menengah Pertama Islam Sunan Kali Jaga Karangpring Sukorambi?
2. Bagaimana cara mendesain kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat?
3. Bagaimana implementasi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat di Sekolah Menengah Pertama Islam Sunan Kali Jaga?

IAIN JEMBER

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mendeskripsikan tentang apa yang dimaksud model pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Mendeskripsikan tentang bagaimana cara mendesain kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat

c. Mendeskripsikan tentang implementasi pengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyrakat di Sekolah Menengah Pertama Islam Sunan Kali Jaga

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

   Memberikan sumbangan kepada masyarakat luas, khususnya lembaga pendidikan, berupa informasi secara teoritik tentang pengembangan kurikulum yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat sekitarnya.

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

   Menjadi tambahan pustaka terhadap wacana pendidikan di Indonesia dan khazanah keilmuan pendidikan, khususnya tentang pengembangan kurikulum pendidikan Agama Islam. Serta sebagai bahan penelitian lebih lanjut tentang kurikulum di Indonesia.

3. Bagi Penulis

   Menambah dan mengembangkan wawasan keilmuan penulis yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum pendidikan nasional.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

E. Definisi Istilah

Pada dasarnya definisi istilah merupakan unsur pokok dari suatu penelitian singkat dari sejumlah fakta atau gejala gejala yang diamati, oleh karena itu, agar terhindar dari saling salah pengertian mengenai konsep konsep yang digunakan, sehingga akan menjadi mudah dalam memahami dan menelaah masalah yang dibahas. Dalam penelitian tentang Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Masyarakat di Sekolah Menengah Pertama Islam Sunan Kali Jaga Karangpring Sukorambi Jember.Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Model

Secara umum model-model pengembangan kurikulum yaitu ada tujuh sebagaimana yang dipaparkan oleh Robert S. Zain, dalam bukunya *Curriculum Principles And Foundation*, berbagai model dalam pengembangan kurikulum secara garis besar diutarakan sebagai berikut: (1) model administratif, (2) model dari bawah (*grass-roats*), (3) model demonstrasi, (4) *beauncham*, (5) model terbalik Hilda Taba, (6) Model Hubungan Interpersonal dari Rogers, (7) Model *Action Research* yang Sistematis.[9]

b. Pengembangan kurikulum

Banyak definisi tentang pengembangan kurikulum yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Diantaranya adalah yang diungkapkan oleh Dakir, sebagai berikut

[9] Dakir, *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> Pada dasarnya pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya psitif yang datangnya dari luar atau dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik.[10]

Selanjutnya lebih khusus, pengertian pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai: "(1) kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, (2) proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik; dan atau (3) kegiatan penyusunan (desain), pelaksanaan, penilaian , dan penyempurnaan kurikulum PAI."[11]

Dari definisi yang telah dijelaskan tersebut, dapat ditarik suatu pengertian dari pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat, yaitu pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berdasarkan perubahan yang dialami dalam masyarakat serta mengacu pada potensi, karakteristik, serta tuntutan masyarakat. Pengembangan kurikulum ini dimaksudkan untuk mengarahkan kurikulum agar dapat lebih sesuai atau memiliki nilai relevansi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

c. Basis Masyarakat

Untuk kehidupan di masyarakat. Jadi, kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Kurikulum Sekolah merupakan bagian dari

[10]Dakir, *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 84.

[11]Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidian Agama Islam Di Sekolah, Madrasah, Dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 10.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

masyarakat yang mempersiapkan anak seharusnya relevan, dalam artian disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat, apakah masyarakat homogen, heterogen, agraris, industri, atau yang lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang secara keseluruhan terdiri dari Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan Hasil Penelitian, dan Penutup.

Pada Bab I berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, serta Sistematika pembahasan.

Pada Bab II berisi tentang penjelasan pendukung yang menjadi dasar teori dari penelitian yang akan dilakukan. Di sini akan dijelaskan tentang model pengembangan kurikulum PAI berbasis masyarakat. Diantaranya adalah pembahasan tentang apa yang dimaksud kurikulum PAI berbasis masyarakat, mendesain kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat, dan implimentasi kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat.

Sedangkan Bab III menguraikan metode penelitan yang digunakan, antara lain meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik penentuan sampel, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian dan pemaparan hasil penelitian di lapangan sesuai dengan urutan masalah atau fokus penelitian. Diantaranya adalah profil Sekolah Menengah Pertama Islam Sunan Kali Jaga, tujuan, visi dan misi, standar

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kompetensi lulusan Sekolah Menengah Pertama Islam, keadaan guru dan karyawan, serta keadaan siswa.

Bab IV adalah pembahasan dan penyajian data dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan. Pada bab ini dibahas mengenai maksud dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat, model dan desain Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat, dan implementasi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat di Sekolah Menengah Pertama Islam Sunan Kali Jaga,

Dan dalam Bab V diuraikan dua hal pokok, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id